

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Papua

Rafly Izza Muhammad¹, Ulyya Vidriza²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Pembangunan “Veteran” Jakarta, Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12450, Indonesia

Histori Artikel:

Pengajuan: 14 Januari 2025

Revisi: 31 Maret 2026

Diterima: 12 Mei 2026

Keywords:

CPI, and Economic Growth,
Open Unemployment Rate,

Abstract

This study aims to analyze the effect of the Open Unemployment Rate, CPI, and Economic Growth on poverty in Papua Province for the period 1993-2023. Papua Province is the province with the highest poverty rate in Indonesia. The data used is secondary data with an annual frequency obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The analysis method used is the Vector Error Correction Model (VECM) to analyze the short-term and long-term relationships between variables. The results show that in the long run, the open unemployment rate, consumer price index, and economic growth have a significant positive effect. In the short term, the variable shows a significant positive effect on poverty in Papua Province, while the consumer price index variable, and economic growth have no significant effect on poverty in Papua Province.

Muhammad, R. I., & Vidriza, U. (2026). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Papua. *Journal of Economic and Regional Science*, 6(1), 60-77.

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, IHK, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Papua periode 1993-2023. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan frekuensi tahunan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah *Vector Error Correction Model* (VECM) untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, tingkat pengangguran terbuka, indeks harga konsumen, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan. Dalam jangka pendek, variabel menunjukkan pengaruh

Kata Kunci:

Indeks Harga Konsumen,
Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat
Pengangguran Terbuka, Dan
VECM.

positif signifikan pada terhadap kemiskinan di Provinsi Papua, sedangkan variabel indeks harga konsumen, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Papua.

JEL Classification: E31, O40, J64, C32

Penulis Korespondensi:

Nama Penulis : Rafly Izza Muhammad

Telpon/HP : 082213029752

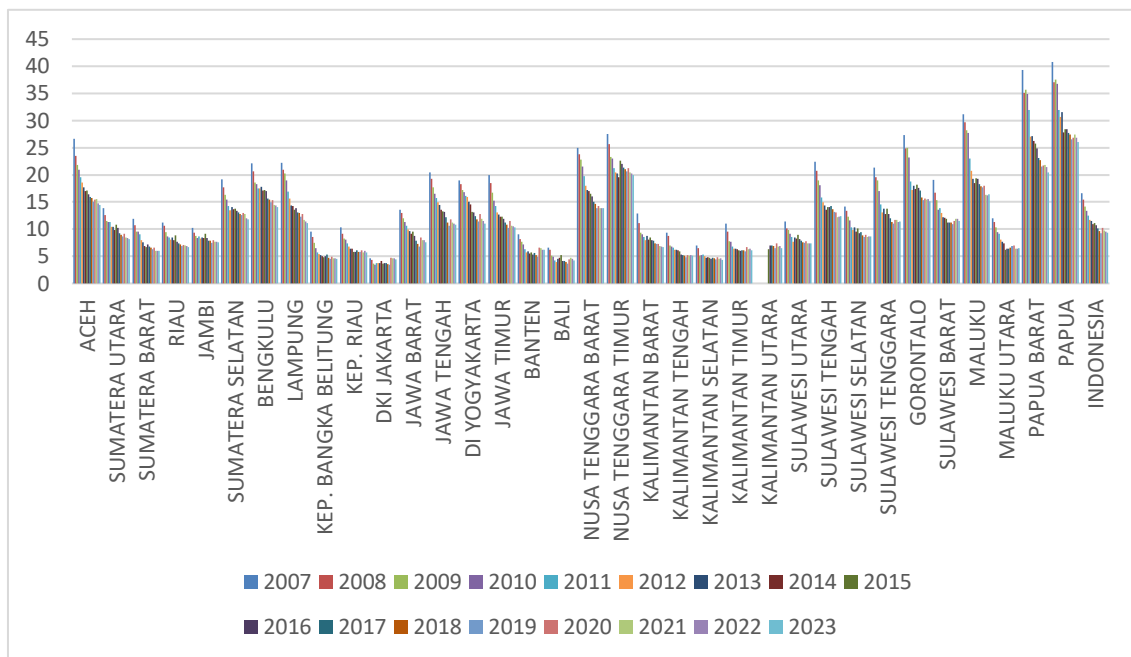
Email : raflyizza09@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara. Kemiskinan menjadi perhatian utama karena dampaknya yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat, seperti kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan publik lainnya. Selain itu, tingkat kemiskinan di suatu wilayah mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya (Prameswari *et al.*, 2021). Kemiskinan yang melanda hampir seluruh dunia menegaskan bahwa *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki sebuah tujuan utama yang telah diputuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan pada sebuah negara. Menurut Pratama (2023), kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan akses yang terdapat di sektor-sektor penting lainnya. Seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, rendahnya keterampilan yang dimiliki, kurangnya akses kesehatan, serta ketersediaan lapangan pekerjaan yang belum memadai sering kali menjadi tantangan utama, karena tanpa pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan cukup, masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Provinsi Papua di Indonesia dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah dari sektor pertambangan, perikanan, dan kehutanan, namun menurut Aminuddin *et al.*, (2023) hingga saat ini, sebagian besar masyarakat Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia, tingkat kemiskinan masih menjadi masalah utama dengan tiga besar Provinsi berada di wilayah Indonesia Timur, salah satunya Provinsi Papua menduduki peringkat pertama dengan persentase 26,03% per bulan Maret 2023, pada urutan kedua disusul oleh Provinsi Papua Barat dengan

persentase 20,49% penduduk miskin, sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan ketiga dengan angka 19,96% (Badan Pusat Statistik, 2023).



Gambar 1. Grafik Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2007-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2023, Papua memiliki persentase kemiskinan tertinggi jika dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya. Persentase penduduk miskin di Papua mencapai 31,53 persen pada tahun 2013, meskipun terjadi penurunan, angka kemiskinan pada tahun 2023 masih berada di angka 26,03 persen. Sementara Papua Barat berada di kisaran 30%, dan Nusa Tenggara Timur sekitar 25%. Hingga tahun 2023, tingkat kemiskinan di Papua turun mendekati 27%, Papua Barat sekitar 20%, dan NTT mendekati 17%. Meski ketiganya menunjukkan tren penurunan, angka-angka tersebut tetap jauh di atas rata-rata nasional, yang berada di kisaran 9-10% pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan Papua mengalami tantangan yang signifikan di bidang kemiskinan. Kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap angka kemiskinan di provinsi ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencatatkan per Maret 2023, persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan mencapai 26,03 persen. Angka ini menunjukkan penurunan yang terjadi sebesar 0,77 persen poin dibandingkan September 2022 dan 0,58 persen poin dibandingkan Maret 2022. Namun, Sugiyanto, Statistisik Ahli Madya Fungsi Statistik Sosial BPS Papua, melaporkan adanya kenaikan persentase penduduk miskin di perkotaan menjadi 5,68 persen pada Maret 2023, meningkat 0,39 persen poin dibandingkan dengan September 2022. Selain itu, per Maret 2023, rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin pada Provinsi Papua ialah 4,98 orang, dengan garis kemiskinan rata-rata per rumah tangga mencapai Rp3.418.616 per bulan. Data ini menggarisbawahi variasi dinamika kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan Papua serta menekankan pentingnya strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.

Dalam penelitian ini menggunakan teori kemiskinan nurske (1953) yang membahas konsep lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), di mana kemiskinan disebabkan oleh pasar yang tidak sempurna, kurangnya kemampuan mengumpulkan modal, serta keterbatasan sumber daya manusia yang tidak dapat berkontribusi optimal, sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah. Lingkaran setan kemiskinan ini mencerminkan hubungan saling memengaruhi antara berbagai faktor yang menghambat pembangunan, khususnya di negara berkembang, sehingga negara-negara tersebut cenderung terjebak dalam kemiskinan (Rahman & Alamsyah, 2019) Sebaliknya, teori pertumbuhan ekonomi inklusif, seperti dijelaskan oleh Klasen (2010), berfokus pada pengurangan kesenjangan dan memastikan pemerataan akses serta peluang bagi semua lapisan masyarakat. Pertumbuhan inklusif tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga mendorong partisipasi setara dalam proses ekonomi, sekaligus menjadi indikator kemajuan ekonomi yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, menciptakan pemerataan pendapatan, serta memperluas kesempatan kerja, sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (Afriyana *et al.*, 2023).

Menurut (Nurvira, 2023) kemiskinan juga memiliki keterkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka, indeks harga konsumen (IHK), dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya tingkat pengangguran terbuka juga dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, indeks harga konsumen yang meningkat dapat memperburuk kemiskinan, karena kenaikan harga barang dan jasa pokok membuat kebutuhan dasar menjadi semakin sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Vinatra (2023) pertumbuhan ekonomi yang baik memainkan peran krusial untuk menurunkan tingkat kemiskinan, yaitu melalui adanya penciptaan lapangan pekerjaan serta memaksimalkan pendapatan masyarakat. Namun, jika pertumbuhan perekonomian negara tidak merata dan tidak inklusif, hal ini dapat memperbesar kesenjangan ekonomi dan membuat upaya pengentasan kemiskinan menjadi kurang efektif (Zakaria, 2020).

Kemudian Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Persentase Penduduk Miskin (PPM) di Provinsi Papua mengalami fluktuasi selama periode 1993–2023. Pada awal periode, IHK tercatat sebesar 132 pada tahun 1993, sementara PPM berada pada 46,02%. Secara umum, IHK menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai puncaknya sebesar 285 pada tahun 2003, namun setelahnya mengalami fluktuasi tajam, seperti penurunan signifikan menjadi 121 pada tahun 2004 sebelum kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Kenaikan IHK yang signifikan, misalnya pada tahun 2003, tampaknya berkorelasi dengan peningkatan PPM dari 34,36% pada tahun 2002 menjadi 38,05% pada tahun 2003. Namun, pada beberapa periode, seperti tahun 2018–2020, meskipun IHK relatif stabil di angka 100–104, PPM tetap mengalami sedikit fluktuasi, menunjukkan bahwa hubungan antara IHK dan PPM tidak selalu linier. Penurunan PPM dari 46,02% pada tahun 1993 menjadi 26,03% pada tahun 2023 mengindikasikan peran faktor lain, seperti kebijakan ekonomi atau distribusi subsidi, yang turut memengaruhi tingkat kemiskinan. Ketidaklinearan ini juga mencerminkan daya beli masyarakat yang tidak sepenuhnya tergambar oleh IHK, terutama karena pengaruh harga kebutuhan pokok yang bervariasi. Stabilitas harga barang dan jasa yang ditunjukkan oleh inflasi terkendali ini mendukung kemampuan konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Sihombing & Pabendon, 2020) sektor pertambangan dan pertanian berkontribusi signifikan terhadap PDB, meskipun tantangan tetap ada dalam memastikan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi secara merata.

Fenomena antara PDRB ADHK dan Persentase Penduduk Miskin (PPM) di Papua menunjukkan data fluktuatif, di mana pada tahun 2004, meskipun PDRB ADHK turun signifikan dari 38,69% pada tahun 2003 menjadi 38,05%, tingkat kemiskinan (PPM) justru meningkat tajam dari 34,36% menjadi 38,05%. Hal serupa terjadi pada tahun 2013, saat PDRB ADHK meningkat dari Rp117.118,82 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp121.391,23 miliar pada tahun 2013, namun PPM malah naik dari 30,66% menjadi 31,53%. Sebaliknya, pada tahun 2023, meskipun PDRB ADHK menurun drastis menjadi Rp49.552,73 miliar dari Rp172.907,29 miliar pada tahun 2022, PPM tetap menunjukkan penurunan stabil dari 26,80% menjadi 26,03%. Penurunan tajam PDRB ADHK pada 2023 terkait dengan pemekaran wilayah Papua menjadi empat provinsi baru sejak 2022, yaitu Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan, yang memengaruhi distribusi data PDRB.

Sebagai bagian dari upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah memberikan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) kepada Provinsi Papua. Dana khusus ini didasarkan pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU No. 21 Tahun 2001) dan disajikan dalam UU No. 2 Tahun 2021. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Dana Otonomi khusus telah ada sejak tahun 2001, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan masih harus dievaluasi secara lebih menyeluruh, mengingat proporsi penduduk miskin di Papua adalah yang tertinggi di Indonesia. Efektivitas Dana Otonomi Khusus dalam mengurangi tingkat kemiskinan juga ditentukan oleh alokasi dan pengelolaan dana tersebut, sehingga menjadi salah satu fokus utama dalam pengentasan kemiskinan yang lebih luas di wilayah ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang antara variabel tingkat pengangguran terbuka, indeks harga konsumen, serta pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Papua.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui analisis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan objek penelitian Provinsi Papua pada periode 1993–2023. Data yang digunakan berupa data *time series* dengan



variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Harga Konsumen (IHK), Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan publikasi resmi, serta analisis data menggunakan *Vector Error Correction Models* (VECM) dengan bantuan *software* EViews 12 Student Version untuk mengidentifikasi hubungan jangka panjang dan dinamika jangka pendek antar variabel.

HASIL

Uji Stasioneritas

Dalam pengujian time series menggunakan metode VAR VECM pada tahapan pertama dapat dilakukan dengan uji stasioneritas biasa disebut juga uji *unit root* pada level dan *first difference* yang bertujuan guna melihat dan menentukan setiap variable bersifat stasioner. Dengan memperhatikan prosedur standar yang terdapat pada pengujian *unit root* yang menggunakan pengujian *Augmented Dickey Fuller* (ADF). Berikut tabel hasil uji *unit root* masing-masing variabel:

Tabel 1. Hasil Uji Stasioner tingkat *First Difference*

Variabel	ADF t-statistic	Probabilitas	Keterangan
PPM	-5.540070	0.0001	Stasioner
TPT	-7.869415	0.0000	Stasioner
IHK	-5.818254	0.0000	Stasioner
PE	-5.122819	0.0003	Stasioner

Sumber: Data diolah Eviews 12 Student Version, 2024

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa t-statistik lebih tinggi daripada nilai uji kritis pada tingkat 5%, serta nilai probabilitas berada dibawah dari alpha 0,05 untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT), Indeks harga konsumen (IHK), dan Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut stasioner pada tingkat *first difference*, dan analisis dapat dilanjutkan ke langkah pengujian panjang lag.

Pengujian Panjang Lag

Menentukan pengujian panjang *lag* dilihat dari hasil *Akaike Information Criterion* (AIC), *Schwarz Information Criterion* (SC), *Hannan-Quinn Kriteria* (HQ), dan *Final*

Prediction Error (FPE). Penelitian ini akan menggunakan lag yang paling banyak direkomendasikan oleh kriteria yang dipilih, seperti yang disajikan pada Tabel 3:

Tabel 2. Hasil Pengujian Panjang Lag

Lag	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	NA*	1.57e+16	48.64264	48.83462*	48.69972*
1	22.38854	1.89e+16	48.81016	49.77004	49.09559
2	25.36161	1.65e+16	48.58637	50.31415	49.10013
3	23.34309	1.30e+16*	48.10419*	50.59988	48.84629

Sumber: Data diolah Eviews 12 Student Version, 2024

Hasil uji Panjang lag dapat dilihat pada tabel 2 di mana berdasarkan kriteiria FPE, AIC, dan HQ yang memiliki nilai AIC terkecil beirada pada lag 3 sebesar 48.10419, sedangkan kriteia SC nilai paling kecil beirada pada lag 0. Dengan demikian dalam peineilitian ini permodelan dinilai optimal apabila dilakukan pada lag 3. Kemudian, setelah panjang lag optimal telah ditemukan.

Uji Stabilitas VAR

Pengujian stabilitas ialah langkah selanjutnya yang dilakukan sebelum masuk ke langkah estimasi berikutnya. Uji stabilitas dikatakan valid dan stabil apabila modulusnya berada dalam *unit circle* atau nilai modulus kurang dari satu (1). Hasil pengujian stabilitas dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Stabilitas

Root	Modulus
-0.84451	0.844551
-0.153287 - 0.828153i	0.842220
-0.153287 + 0.828153i	0.842220
0.734252 + 0.408279i	0.840130
0.734252 - 0.408279i	0.840130
0.179594 - 0.802874i	0.822716
0.179594 + 0.802874i	0.822716
-0.472394 + 0.645230i	0.799673
-0.472394 + 0.645230i	0.799673
-0.471225 - 0.189300i	0.507826
-0.471225 + 0.189300i	0.507826
0.441608	0.441608

Sumber: Data diolah Eviews 12 Student Version, 2024

Dari tabel 3 diatas, dapat dijelaskan bahwa model yang digunakan sudah stabil dari lag 1-2. Hal tersebut dapat diketahui dari kisaran modulus dengan nilai rata-rata kurang dari satu. Dan selanjutnya dilakukan pengujian kausalitas *granger*.

Uji Kausalitas Granger

Uji Kausalitas *granger* bermaksud untuk melihat hubungan sebab akibat dari masing-masing variabel antara dependen dan independen. Nilai probabilitas yang terlibat pada uji kausalitas *granger* harus berada kurang dari tingkat signifikansi alpha 5%, maka dapat diartikan terdapat hubungan sebab akibat antar variabel. Namun jika nilai probabilitas diatas tingkat signifikansi alpha 5% berarti tidak terdapat hubungan sebab akibat. Pada uji kausalitas ini menggunakan panjang lag sampai dengan lag 3 sesuai dengan uji panjang lag optimal yang dilakukan. Hasil kausalitas Granger ditunjukkan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis	Obs	F-Statistic	Prob.
PE does not Granger Cause PPM	28	0.8459	0.4603
PPM does not Granger Cause PE		0.62265	0.6082
IHK does not Granger Cause PPM	28	6.15222	0.0036
PPM does not Granger Cause IHK		1.40382	0.2695
TPT does not Granger Cause PPM	28	6.41922	0.0029
PPM does not Granger Cause TPT		0.58509	0.6314
IHK does not Granger Cause PE	28	0.47522	0.7029
PE does not Granger Cause IHK		3.85384	0.0242
TPT does not Granger Cause PE	28	4.92300	0.0096
PE does not Granger Cause TPT		0.86473	0.4748
TPT does not Granger Cause IHK	28	0.39229	0.7598
IHK does not Granger Cause TPT		8.87301	0.0005

Sumber: Data diolah Eviews 12 Student Version, 2024

Dari hasil pengujian pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat hipotesis searah dengan nilai probabilitas berada pada angka 0.05 seperti variabel indeks harga konsumen (IHK) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM), dengan nilai probabilitas sebesar 0.0036, lalu Pada variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara statistik signifikan mempengaruhi Persentase Penduduk Miskin (PPM) dengan probabilitas sebesar 0.0029, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) secara signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dengan probabilitas sebesar 0.0096, dan variabel Indeks harga konsumen (IHK) secara signifikan mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan nilai probabilitas sebesar 0.0005.

Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi bertujuan guna mengetahui hubungan jangka panjang setiap variabel, sebab syarat estimasi VECM ialah harus adanya hubungan kointegrasi didalam variabel. Uji kointegrasi Johansen yaitu dengan membandingkan *trace statistic* dengan nilai kritis yang digunakan (5% atau 0,05). Apabila *trace statistic* nilainya lebih besar dari nilai kritis 0,05, maka dapat dikatakan terjadi kointegrasi dalam persamaan yang di uji. Berikut hasil uji kointegrasi Johansen:

Tabel 5. Hasil Kointegrasi Johansen

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None*	0.908592	143.5525	47.85613	0.0000
At Most 1*	0.844875	78.95719	29.79707	0.0000
At Most 2*	0.506111	28.64200	15.49417	0.0003
At Most 3*	0.299087	9.595016	3.841465	0.0020

Sumber: Data diolah Eviews 12 Student Version, 2024

Pada tabel 5, hasil analisis menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5 persen (0,05), terdapat empat rank variabel yang memiliki hubungan kointegrasi. Hal ini terlihat dari nilai trace statistic sebesar 143.5525, 78.95719, 28.64200, dan 9.595016, yang seluruhnya lebih besar dibandingkan nilai Critical Value 0,05, yaitu 47.85613, 29.79707, 15.49471, dan 3.841465. Probabilitas masing-masing sebesar 0.0000, 0.0000, 0.0003, dan 0.0020, yang lebih kecil dari 0,05, juga mengonfirmasi adanya hubungan jangka panjang antarvariabel yang dianalisis. Dengan demikian, metode estimasi VECM dapat digunakan dalam penelitian ini.

Estimasi Vector Error Correction Model (VECM)

Estimasi VECM dilaksanakan untuk mengetahui adanya hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel. Penelitian ini menggunakan nilai

signifikansi α 5%. Jika nilai t-tabel sebesar 2,004045 maka variabel berpengaruh signifikan. Berikut hasil estimasi VECM yang dilakukan:

Tabel 6. Hasil Estimasi Vector Error Correction Model (VECM) Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Variabel	Koefiesien	T-statistic	Keterangan
Jangka Panjang			
TPT (-1)	-27.74114	-6.66774	Signifikan
IHK (-1)	1.193993	8.191084	Signifikan
PE (-1)	1.14E-05	-11.1945	Signifikan
Jangka Pendek			
D(Y_PPM(-1))	-0.128312	-0.59977	Tidak Signifikan
D(X1_TPT(-1))	0.788972	1.95800	Tidak Signifikan
D(X2_IHK(-1))	0.022330	-1.56826	Tidak Signifikan
D(X3_PE(-1))	-2.64E-07	-0.83778	Tidak Signifikan
D(Y_PPM(-2))	-0.165848	-0.93003	Tidak Signifikan
D(X1_TPT(-2))	1.119051	2.74138	Signifikan
D(X2_IHK(-2))	-0.009169	-0.07922	Tidak Signifikan
D(X3_PE(-2))	-2/64E-07	-0.77378	Tidak Signifikan
D(Y_PPM(-3))	0.442050	2.86862	Signifikan
D(X1_TPT(-3))	0.2786141	0.61449	Tidak Signifikan
D(X2_IHK(-3))	-0.009169	-0.083832	Tidak Signifikan
D(X3_PE(-3))	-2.32E-07	-0.66270	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah Eviews 12 Student Version, 2024

Berdasarkan Tabel 6, dalam jangka panjang, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) dengan nilai t-statistic sebesar -6.66774 yang lebih besar dari t-tabel 2.004045. Selanjutnya, variabel Indeks Harga Konsumen (IHK) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PPM, ditunjukkan oleh nilai t-statistic sebesar 8.191084 yang melebihi t-tabel. Terakhir, variabel Pertumbuhan Ekonomi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PPM dengan nilai t-statistic -11.1945 yang juga lebih besar dari t-tabel 2.004045.

Sementara pada jangka pendek pada lag 1 dan lag 3, seluruh variabel (TPT, IHK, dan PE) tidak berpengaruh terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM) karena nilai t-statistic lebih kecil dari t-Tabel (2.004045). Namun, pada lag 2, hanya variabel TPT yang berpengaruh signifikan terhadap PPM dengan nilai t-statistic 2.74138 yang

melebihi t-Tabel, sementara variabel IHK dan PE tetap tidak signifikan. Dengan demikian, dalam jangka pendek, hanya TPT yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PPM, sedangkan IHK dan PE tidak memberikan pengaruh yang signifikan di semua lag yang diuji.

Variance Decomposition (VD)

Variance Decomposition, atau yang lebih dikenal sebagai Forecast Error Variance Decomposition (FEVD), adalah tahap analisis dalam model VAR/VECM yang menyajikan estimasi kontribusi masing-masing variabel penelitian terhadap variabel terikat dalam beberapa periode ke depan. Analisis ini menghasilkan persentase yang mencerminkan kontribusi pada setiap variabel.

Tabel 7. Hasil Uji Variance Decomposition (VD)

Variance Decomposition of PPM	S.E.	PPM	TPT	IHK	PE
1	1.370819	100.0000	0.000000	0.000000	0.000000
2	1.848530	86.70807	4.854531	0.106040	8.331359
3	2.046892	86.73070	5.658514	0.810635	6.80015
4	2.906461	82.07746	4.569332	1.498167	11.85504
5	4.050074	70.49752	13.41981	1.571660	14.51100
6	5.047360	61.68632	15.44607	1.665670	21.20194
7	6.106359	56.63826	16.55321	1.670883	25.13765
8	7.015849	54.15847	18.39371	1.503217	25.94461
9	7.559649	53.18305	19.05359	1.475692	26.28767
10	7.955216	53.01465	19.10651	1.461788	26.41706
AVG	4.59	70.46	11.70	1.18	16.65

Sumber: Data diolah Eviews 12 Student Version, 2024

Berdasarkan Tabel 15, dalam tiga dekade terakhir, perubahan Persentase Penduduk Miskin (PPM) di Provinsi Papua paling banyak dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi dengan kontribusi rata-rata sebesar 16,65%. Diikuti oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menyumbang 11,70% terhadap perubahan PPM. Sementara itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) memberikan dampak yang jauh lebih kecil, hanya 1,18%.

PEMBAHASAN**Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua**

Berdasarkan hasil uji Vector Error Correction Model (VECM) dalam jangka panjang pada Tabel 6, terlihat koefisien variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar $-27,74114$ dan nilai t-statistik sebesar $-6,66774$, yang lebih besar dari t-tabel sebesar $2,004045$, sehingga berdampak signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM). Kemudian, pada jangka pendek, nilai koefisien variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar $1,119051$ dan nilai t-statistik sebesar $2,74138$, yang menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh signifikan. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka dalam jangka panjang dan jangka pendek terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan. Dampak ini menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran terbuka meningkatkan kemiskinan di Provinsi Papua, keadaan ini menunjukkan bahwa tingginya angka pengangguran menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat sehingga banyak orang yang terjerumus ke dalam kemiskinan

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2021) yang mengambil wilayah Jawa Tengah sebagai objek penelitiannya. Penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faisal & Ichsan, 2020) di Indonesia, yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Dalam menangani permasalahan pengangguran, pemerintah Provinsi Papua mendapatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) guna mendanai program pendidikan dalam rangka mengatasi pengangguran, sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan. Dana Otsus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemberian beasiswa pendidikan bagi putra-putri Papua, terutama Orang Asli Papua (OAP), mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas guna menciptakan tenaga kerja yang terdidik dan kompetitif. Selain itu, dana ini juga dialokasikan untuk pelatihan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan

pasar kerja, seperti pelatihan keterampilan berbasis teknologi tepat guna, kewirausahaan, dan keterampilan teknis lainnya. Program pelatihan ini diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja dan Industri (BLKI) Papua, dengan harapan dapat menciptakan SDM yang memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja, sehingga secara bertahap mengurangi tingkat pengangguran di Papua.

Pengaruh Indeks Harga Konsumen Terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan pada tabel 6, dalam jangka panjang koefisien Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 1.193993 dengan t-statistik 8.191084, yang lebih besar dari t-tabel 2.004045, sehingga dampaknya signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin (PPM). Sebaliknya, pada jangka pendek, koefisien IHK bernilai 0.022330 dengan t-statistik -1.56826 yang lebih kecil dari t-tabel, menunjukkan bahwa dampak inflasi terhadap PPM tidak signifikan, Perubahan harga tidak memberikan dampak langsung yang besar terhadap tingkat kemiskinan dalam jangka pendek, namun dampak positif peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencerminkan inflasi dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin, akibat menurunnya daya beli masyarakat karena kenaikan harga barang dan jasa, yang memperburuk perekonomian masyarakat miskin. Oleh karena itu, upaya pengendalian inflasi tetap diperlukan untuk mengurangi dampak jangka panjang inflasi terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Bisai et al. 2021) yang menyatakan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Fluktuasi harga barang dan jasa yang tercermin dalam IHK dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama rumah tangga miskin, yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok akibat kenaikan harga. Meskipun dampaknya tidak signifikan dalam jangka pendek, fluktuasi harga jangka panjang berkontribusi pada kemiskinan yang lebih akut. Oleh karena itu, pengendalian harga dan kebijakan ekonomi untuk menstabilkan IHK penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat, pada tahun 2021, pemerintah menyalurkan bantuan tunai tambahan kepada rumah tangga miskin

ekstrem di lima kabupaten prioritas di Papua, yaitu Jayawijaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Deiyai, sebagai bagian dari upaya mengurangi kemiskinan ekstrem. Bantuan ini disalurkan melalui dua program utama: Program Sembako untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat desa. Program ini bertujuan mengurangi kemiskinan tinggi di daerah tersebut dan diharapkan memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan ekstrem serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua

Hasil uji VECM jangka panjang pada Tabel 6 menunjukkan bahwa koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 0.0000114 dan nilai t-statistik sebesar -11.1945 lebih besar dari t-tabel sebesar 2.004045. Ini berdampak besar pada PPM. Namun koefisien positif menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi, namun dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan masih kurang optimal. Hal ini mungkin disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak merata atau belum menjangkau seluruh sektor masyarakat.

Dalam jangka pendek hasil data pada Tabel 6, nilai koefisien PE sebesar -0.000000264 dan t-statistik sebesar -0.83778 menunjukkan bahwa pengaruh PE terhadap PPM tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan akan memerlukan waktu untuk dirasakan, terutama di wilayah seperti Papua yang menghadapi tantangan infrastruktur dan aksesibilitas. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang adil.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susanto & Pamegisti, 2020), yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan. Penemuan serupa juga diungkapkan oleh penelitian (Nainggolan, 2020), yang menegaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi salah satu solusi efektif untuk

menurunkan tingkat kemiskinan, sebagaimana didukung oleh temuan-temuan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Pemerintah Provinsi Papua telah mengimplementasikan banyak inisiatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keamanan publik. Beberapa proyek termasuk pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans-Papua sepanjang 2.902 kilometer, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antar daerah, mengurangi biaya distribusi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, serta proyek Youtefa, yang menghubungkan Kota Jayapura dan Distrik Muara Tami untuk meningkatkan aksesibilitas. Selain itu, pengembangan sumber daya perairan seperti nikel, gas alam, dan eksplorasi minyak bumi dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif jangka panjang, dengan fokus pada pengembangan sektor kehutanan dan perkebunan untuk mendukung ekonomi lokal dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan. Pemerintah juga memprioritaskan kesejahteraan ekonomi masyarakat umum melalui pemaksimalan potensi unggulan daerah dan membina hubungan CSR dengan pelaku usaha lokal. Dalam hal peningkatan kualitas hidup manusia, program pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama.

SIMPULAN

Berangkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ketiga variabel yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT), indeks harga konsumen (IHK)], pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada periode 1993-2023 memiliki hubungan terhadap kemiskinan baik dalam jangka pendek, dan jangka panjang. Hal ini dapat dilihat dengan hasil pada tabel 5, dimana hasil Uji Estimasi VECM menggambarkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Papua baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan variabel indeks harga konsumen dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan pada jangka panjang, namun dalam jangka pendek variabel indeks harga konsumen (IHK) dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Papua.

SARAN

Pemerintah diharapkan memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan di Papua, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi, serta menelaraskan subsidi dan bantuan sosial dengan kebutuhan masyarakat lokal melalui sistem monitoring yang efektif. Selain itu, kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan peluang kerja berkelanjutan, khususnya di sektor perikanan dan kehutanan. Lalu, dapat dilakukan analisis lebih mendalam mengenai hubungan antara alokasi anggaran di sektor-sektor tersebut dengan penurunan kemiskinan, sehingga dapat memberikan landasan teoretis baru tentang dampak kebijakan fiskal terhadap pengentasan kemiskinan. Dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian, dengan melakukan penambahan variabel-variabel baru seperti, distribusi pendapatan, tingkat pendidikan, kebijakan pemerintah, dan infrastuktur. Serta dapat menggunakan metode analisis lain seperti ARDL ataupun model lain sebagai pilihan metode untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemiskinan yang terjadi di Provinsi Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyana, L., Salmah, E., Sriningsih, S., & Harsono, I. (2023). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada tahun 2016-2021. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5 (1), 1-12.
- Aminuddin, M. A., & Burhanuddin, A. (2023). Potensi Kekayaan Dan Keberagaman Maritim Di Wilayah Papua Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Masyarakat. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1 (4), 157-176.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen) 2007-2023*. Diambil kembali dari bps.go.id: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>
- Faisal, M., & Ichsan. (2020). The Analysis of Economic Growth, Unemployment Rate and Inflation on Poverty Levels in Indonesia (Using the Vector Error Correction Model (VECM) Method). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2).

- Nurvira. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia.
- Prameswari, A., Muljaningsih, S., & Asmara, K. (2021). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Indeks Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7, 168-179.
- Rahman, A., & Alamsyah, M. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Konsumsi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Migran Di Kota Makassar. *EcceS: Economics Sosial and Development Studies*, 6 (1), 111-129.
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 10(2).
- Sihombing, R. G., & Pabendon, T. (2020).). Strateigi Peingeimbangan Wilayah-Wilayah Meinjadi Pusat Peirtumbuhan Beirdasarkan Seiktor Basis Di Kabupatein Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 4 (1), 62-77.
- Zakaria, J. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Makassar. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 41-53.